

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Putra & Wibawa (2020) teori agensi diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dan berfokus pada hubungan antara pihak yang mendelegasikan tugas atau pemilik (*principal*) dengan pihak yang menjalankan tugas atau manajer (*agent*). Hubungan ini dapat menciptakan permasalahan ketika kepentingan antara prinsipal dan *agent* tidak selaras, yang dikenal sebagai *agency problem*. Dalam konteks bisnis, pemilik usaha (*principal*) memberikan wewenang kepada manajer atau karyawan (*agent*) untuk mengambil keputusan, namun sering kali agen cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi daripada kepentingan pemilik usaha. Dalam konteks usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemilik bisnis sering berperan sebagai prinsipal, sedangkan pihak yang mengelola usaha atau mitra bisnis dapat bertindak sebagai agen. Ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak dapat berdampak pada pengelolaan keuangan, penggunaan teknologi keuangan (*fintech*), tingkat literasi keuangan, dan kinerja usaha secara keseluruhan (Winarto, 2021).

Pada konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan kontrol keuangan untuk memastikan bahwa agen (misalnya, manajer atau pengelola keuangan) bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (pemilik usaha). Ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal dapat memunculkan perilaku *oportunistik* dari agen, yang

berpotensi merugikan kinerja usaha. Dengan menerapkan sistem pengendalian keuangan yang efektif, UMKM dapat meminimalkan risiko tersebut dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana (Pramudya, 2024).

2.1.2 Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*)

Menurut Nugroho & Susanto (2022) teori Difusi Inovasi mula-mula diungkapkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962, teori ini menjelaskan bahwa proses tentang proses pengenalan, penyebaran, hingga penerimaan suatu inovasi oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Inovasi merujuk pada segala bentuk ide, praktik, atau teknologi baru yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan cara lama. Difusi melibatkan empat komponen pokok: inovasi, saluran komunikasi, kerangka waktu, dan sistem sosial. Rogers membagi tahapan adopsi inovasi ke dalam lima kategori: *innovator*, *early adopters*, *early majority*, *late majority*, dan *laggards*. Masing-masing kategori memiliki tingkat kesiapan dan kecepatan berbeda dalam menerima dan mengimplementasikan inovasi.

Teori Difusi Inovasi dalam kontek UMKM sangat berkaitan dengan *financial technology (fintech)* yang mana sebagai bentuk inovasi digital diserap oleh pelaku usaha. *Fintech* menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif, seperti sistem pembayaran digital, pinjaman online, serta aplikasi pencatatan keuangan, namun tidak semua UMKM secara seragam teknologi dalam kegiatan usahanya, hal ini dikarenakan beberapa faktor-faktor seperti tingkat literasi digital, usia pemilik usaha, akses terhadap internet, dan kepercayaan

terhadap sistem digital sangat memengaruhi proses adopsi tersebut (Hartati & Yuliana, 2022).

Penggunaan *fintech* oleh UMKM dapat berdampak signifikan terhadap kinerja usaha, terutama dalam hal efisiensi operasional, manajemen keuangan, dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan. UMKM yang berada dalam kelompok inovator atau *early adopters* cenderung mengalami peningkatan produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang lebih lambat dalam mengadopsi teknologi. Untuk itu, menguasai teori difusi inovasi penting dalam menyusun strategi edukasi dan intervensi kebijakan yang dapat mempercepat transformasi digital pada UMKM melalui pemanfaatan *fintech* (Purwaningtyas & Alim, 2023).

2.1.3 Theory of Reasoned Action (TRA)

Menurut Sari & Wibowo (2023) *Theory of Reasoned Action (TRA)* adalah teori dalam psikologi sosial yang diciptakan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975, yang berpendapat bahwa karakter orang dipandang oleh niat yang dimilikinya (*intention*) guna menilai perilaku tersebut, dan niat itu sendiri terbentuk dari dua faktor utama, yaitu *Attitude toward the behavior* diartikan sebagai persepsi individu dalam menilai suatu perilaku, apakah dianggap menguntungkan (baik) atau merugikan (buruk) dan norma subjektif (*Subjective norms*) sebuah persepsi orang terhadap beban sosial atau harapan orang lain (keluarga, teman, masyarakat) yang mendorong atau menghambat individu dalam melakukan perilaku tersebut. TRA berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan informasi secara sistematis sebelum memutuskan pilihan. Dengan demikian, jika

seseorang punya sikap baik terhadap hal perilaku dan dirasa ada dukungan sosial, maka niat untuk melakukannya akan tinggi, yang pada akhirnya mendorong perilaku aktual.

Literasi keuangan menjadi elemen penting dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) karena pengetahuan yang baik tentang konsep keuangan dapat membantu individu mengurangi pengaruh bias kognitif dan membuat keputusan keuangan yang lebih rasional (Tandelilin, 2023). Pada konteks UMKM, TRA sering digunakan untuk menjelaskan bahwa niat pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi digital, seperti aplikasi keuangan, *e-commerce*, atau media sosial sebagai alat pemasaran dan keputusan pelaku UMKM dalam menjalankan praktik usaha tertentu, misalnya dalam pengelolaan keuangan, inovasi produk, atau partisipasi dalam pelatihan. Sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu jika seorang pelaku UMKM memiliki sikap positif terhadap penggunaan aplikasi pencatatan keuangan (misalnya menganggapnya membantu dan efisien), serta merasa bahwa lingkungan sosialnya (rekan bisnis, konsultan, keluarga) mendukung penggunaan aplikasi tersebut, maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan berniat untuk menggunakannya dan kemudian benar-benar menggunakannya dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Pengusaha UMKM yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung mampu merencanakan anggaran dengan baik, mengelola arus kas secara efektif, serta mengambil keputusan investasi dan pembiayaan secara bijak. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan dapat menyebabkan perilaku keuangan yang impulsif dan keputusan usaha yang keliru, yang pada akhirnya menurunkan

kinerja usaha. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM bukan hanya meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola keuangan, tetapi juga memperbaiki perilaku keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap pertumbuhan dan daya saing usaha (Wulandari & Santoso, 2023).

2.1.4 Teori Perilaku Keuangan (*Behavioral Finance Theory*)

Menurut Mala (2022) teori Perilaku Keuangan (*Behavioral Finance Theory*) ialah pendekatan lintas disiplin yang memadukan psikologi dan ekonomi dalam menjelaskan bagaimana individu dalam dunia keuangan sering kali tidak bertindak secara rasional sebagaimana diasumsikan oleh teori keuangan tradisional. Teori ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan model-model klasik yang mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi selalu membuat keputusan secara logis dan berdasarkan informasi yang sempurna. Sebaliknya, behavioral finance berpendapat bahwa keputusan keuangan banyak dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, dan intuisi, seperti *overconfidence* (percaya diri berlebihan), *herding behavior* (ikut-ikutan), dan *loss aversion* (ketakutan berlebihan terhadap kerugian).

Pada konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendekatan ini sangat relevan karena pemilik UMKM umumnya mengelola usaha secara langsung dan menjadi pengambil keputusan utama, yang menjadikan aspek psikologis dan perilaku memiliki dampak besar terhadap keberhasilan usaha. Teori Perilaku Keuangan (*Behavioral Finance Theory*) memberikan perspektif penting dalam memahami bagaimana keputusan keuangan yang diambil oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh faktor psikologis dan perilaku.

Bagi UMKM, teori ini menyoroti bahwa keputusan keuangan tidak selalu rasional, melainkan dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, dan kebiasaan individu sehingga teori ini sangat cocok untuk menjelaskan tentang bagaimana keberhasilan kinerja suatu usaha khususnya kinerja usaha UMKM.

Perilaku keuangan yang bijaksana memungkinkan UMKM untuk mendistribusikan sumber daya dengan cara yang efisien, mengelola ancaman, dan menanggapi perubahan pasar dengan lebih fleksibel. Ini terjadi karena performa usaha UMKM yang optimal berasal dari perilaku keuangan yang baik (Qur'anisa et al, 2024). Kinerja usaha yang memuaskan menciptakan perilaku keuangan yang positif. UMKM yang memiliki tingkat pengetahuan serta pemahaman keuangan yang tinggi, ditambah dengan keyakinan dalam pengelolaan keuangan, cenderung menunjukkan kinerja usaha yang superior. (Asmin et al, 2021).

2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (2023), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha, dengan kriteria tertentu seperti jumlah aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja. UMKM memegang peran penting dalam ekonomi, seperti menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong inovasi di tingkat lokal. Di Indonesia, UMKM didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UMKM berperan dalam meningkatkan inklusi ekonomi karena sifatnya yang fleksibel dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan pemasaran. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan digitalisasi, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Arief et al., 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, kriteria UMKM dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Usaha Mikro dengan kriteria:
 - a. Aset: Nilainya tidak lebih dari Rp50 juta, dengan pengecualian tanah dan bangunan.
 - b. Omzet: Pendapatan tahunan maksimal sebesar Rp300 juta..
2. Usaha Kecil dengan kriteria:
 - a. Aset: Di rentang Rp50 juta hingga Rp500 juta.
 - b. Omzet: Berada pada kisaran Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar per tahun.
3. Usaha Menengah dengan kriteria:
 - a. Aset: Berkisar dari Rp500 juta sampai Rp10 miliar.
 - b. Omzet: Di rentang Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.

2.1.6 Peran UMKM dalam Perekonomian

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (2023) peran UMKM yaitu sebagai berikut:

1. UMKM menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat pengangguran yang masih tinggi,

keberadaan UMKM membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. UMKM berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal. Dengan adanya UMKM, perekonomian di daerah-daerah terpencil pun dapat berkembang.
3. Dengan adanya UMKM, masyarakat dapat memulai usaha sendiri yang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal ini juga mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan di sektor formal.
4. UMKM seringkali menjadi wadah bagi pengusaha untuk berinovasi dan menciptakan produk-produk kreatif yang memiliki nilai jual tinggi. Contohnya adalah industri kerajinan tangan, kuliner, dan produk lokal lainnya.
5. Memiliki kontribusi terhadap PDB negara.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, termasuk dalam membuka peluang kerja, penggerak ekonomi daerah, maupun kontribusi terhadap PDB. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, teknologi, pemasaran, dan regulasi masih menjadi penghambat perkembangan UMKM. Perlu sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM supaya mampu berkembang lebih tangguh dan kompetitif.

2.2 Teori Variabel X dan Y

2.2.1 Kinerja Usaha

2.2.1.1 Pengertian Kinerja Usaha

Kinerja usaha adalah ukuran keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan keberlanjutan. Penilaian kinerja usaha sering kali dikaitkan dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan penerapan strategi yang tepat. Mengemukakan bahwa kinerja usaha dapat diukur melalui indikator keuangan dan non-keuangan, termasuk kepuasan pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi (Kaplan dan Norton, 2021).

Menurut Richard et al. (2022), kinerja usaha adalah evaluasi hasil dari seluruh proses manajemen yang meliputi pencapaian tujuan, efisiensi operasional, dan keberhasilan dalam memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Definisi ini menekankan bahwa kinerja usaha mencakup aspek finansial dan non-finansial.

Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja usaha adalah konsep multidimensi yang mencakup berbagai indikator finansial dan non-finansial. Evaluasi kinerja usaha yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif seperti *Balanced Scorecard*, *Performance Prism*, atau *Six Sigma*. Berbagai faktor internal seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan kualitas manajemen, serta faktor eksternal seperti persaingan pasar, teknologi, dan kebijakan pemerintah, memengaruhi kinerja usaha.

2.2.1.2 Karakteristik Kinerja Usaha

Menurut Hasan dan Setiawan (2022) kinerja usaha mencerminkan hasil dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu usaha. Karakteristik kinerja usaha dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, antara lain:

1. Efisiensi Operasional: Kemampuan usaha untuk menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan produk atau layanan.
2. Produktivitas: Tingkat kemampuan usaha dalam menghasilkan output berdasarkan input yang digunakan.
3. Keberlanjutan (*Sustainability*): Kemampuan usaha untuk bertahan dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
4. Kualitas Produk atau Layanan: Penilaian kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan yang disajikan.
5. Inovasi: Kemampuan usaha untuk menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang memberikan nilai tambah.
6. Pertumbuhan Pendapatan dan Laba: Perkembangan keuntungan dan pendapatan usaha dari waktu ke waktu.
7. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Kemampuan usaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau lingkungan bisnis.

2.2.1.3 Manfaat Kinerja Usaha

Menurut Putra dan Wibawa (2020) manfaat kinerja usaha mengacu pada keuntungan yang diperoleh organisasi atau bisnis dari pengukuran dan evaluasi kinerjanya, antara lain:

1. Pengambilan keputusan yang lebih baik.
Dengan data kinerja yang akurat, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait strategi bisnis, investasi, dan operasional.
2. Peningkatan efisiensi operasional.
Evaluasi kinerja membantu mengidentifikasi proses yang tidak efisien sehingga perusahaan dapat melakukan optimalisasi sumber daya.
3. Pengukuran terhadap target dan tujuan.
Mengukur kinerja usaha memastikan bahwa perusahaan dapat memantau seberapa jauh mereka telah mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan daya saing.
Dengan memperbaiki kinerja usaha, perusahaan bisa lebih bersaing di pasar dengan meningkatkan kualitas produk, layanan pelanggan, dan inovasi.
5. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan.
Analisis kinerja membantu menentukan area yang berpotensi untuk pertumbuhan dan inovasi bisnis.
6. Meningkatkan kepuasan pelanggan
Kinerja usaha yang baik sering kali berkorelasi dengan kualitas produk dan layanan yang lebih baik, yang berdampak positif pada kepuasan pelanggan.
7. Manajemen risiko yang lebih efektif.
Dengan memantau kinerja usaha, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko lebih awal dan mengembangkan strategi mitigasi.

2.2.1.4 Indikator Kinerja Usaha

Menurut Yulianto & Rita (2023) untuk mengukur kinerja usaha, beberapa indikator umum yang sering digunakan adalah:

1. Pertumbuhan penjualan
2. Pertumbuhan modal
3. Pertumbuhan pasa dan pemasaran
4. Pertumbuhan keuntungan atau laba usaha

3.2.2 Pengelolaan Keuangan

3.2.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Menurut Brigham dan Houston (2021) Manajemen keuangan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan dana suatu entitas. Pengelolaan keuangan yang optimal sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM). Pengelolaan keuangan yang efektif melibatkan pengaturan arus kas, penganggaran, dan pengendalian biaya yang berdampak langsung pada kinerja usaha.

Menurut Lusardi & Mitchell (2022) manajemen keuangan adalah rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian dana, baik pada tingkat individu, rumah tangga, maupun organisasi. Fokus utamanya ialah menjamin bahwa keuangan digunakan dengan cara yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, individu atau organisasi dapat memenuhi kebutuhan masa kini, merencanakan masa depan, dan mencapai tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang.

Para ahli telah mendefinikan sehingga bisa disimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan adalah keterampilan penting yang membantu individu dan organisasi mencapai stabilitas finansial dan tujuan hidup. Prinsip dasar seperti budgeting, menabung, berinvestasi, dan mengelola utang adalah fondasi dari pengelolaan keuangan yang baik.

3.2.2.2 Manfaat Pengelolaan Keuangan

Menurut Kahneman (2021) pengelolaan keuangan sangat penting karena:

1. **Menghindari Masalah Keuangan.**

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, individu dapat menghindari utang yang berlebihan dan kebangkrutan. Mengetahui batas pengeluaran dan disiplin dalam mengelola pendapatan adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas finansial.

2. **Mencapai Tujuan Finansial.**

Sasaran finansial seseorang bisa meliputi kepemilikan rumah, dana pendidikan anak, atau rencana berlibur. Pengelolaan keuangan membantu menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan efektif.

3. **Mempersiapkan Masa Depan.**

Masa depan penuh dengan ketidakpastian. Dengan menabung dan berinvestasi secara teratur, individu dapat mempersiapkan diri untuk situasi tak terduga dan memastikan masa depan yang lebih aman.

4. Meningkatkan Kualitas Hidup.

Stabilitas finansial memberikan ketenangan pikiran dan memungkinkan individu menikmati hidup tanpa stres terkait masalah keuangan. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan mental dan fisik secara keseluruhan.

5. Mengurangi Risiko Keuangan.

Melalui pengelolaan keuangan yang baik, risiko keuangan, seperti inflasi, kerugian investasi, atau pengeluaran mendadak, dapat diminimalkan.

3.2.2.3 Strategi Pengelolaan Keuangan Efektif

Menurut Piketty (2022) strategi pengelolaan keuangan yang efektif yaitu sebagai berikut:

1. Rencana keuangan mencakup pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan pengelolaan utang. Dengan rencana keuangan yang jelas, individu memiliki panduan untuk mengelola sumber daya mereka.
2. Aplikasi pengelolaan keuangan, seperti aplikasi budgeting dan investasi, membantu memantau pengeluaran dan kinerja investasi secara *real-time*. Teknologi ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan finansial berdasarkan data yang akurat.
3. Diversifikasi berarti upaya menurunkan risiko investasi melalui penyebaran dana ke sejumlah aset berbeda, seperti saham, obligasi, properti, maupun emas. Strategi ini membantu meminimalkan risiko kerugian besar.
4. Pengetahuan tentang keuangan terus berkembang. Mengikuti pelatihan, membaca buku, atau mengikuti seminar tentang keuangan membantu individu meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan mereka.

5. Melakukan evaluasi keuangan membantu mengidentifikasi apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan setidaknya sekali dalam enam bulan.

3.2.2.4 Indikator Pengelolaan Keuangan

Indikator pengelolaan keuangan menurut Melisa, et al. (2023) yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan Sumber Dana

Yakni kemampuan individu dalam mengidentifikasi dan menentukan sumber dana yang dimiliki, serta mencari alternatif pendanaan lain sebagai tambahan pemasukan.

2. Penggunaan Dana

Yakni bagaimana seseorang membagi dan menggunakan dana yang dimilikinya agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan tepat.

3. Manajemen Risiko

Yakni pengelolaan keuangan yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

4. Perencanaan Masa Depan

Yakni perencanaan yang umumnya dilakukan dengan menganalisis kebutuhan di masa mendatang, sehingga keuangan dapat dipersiapkan sejak dini.

3.2.3 *Financial Technology*

3.2.3.1 Pengertian *Financial Technology*

Di Indonesia, industri *fintech* berkembang pesat seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan perangkat seluler. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan signifikan dalam jumlah platform *fintech*, termasuk layanan pembayaran digital, *peer-to-peer* (P2P) lending, investasi *online*, dan teknologi *blockchain*.

Menurut Gai et al. (2022) *Fintech* (*financial technology*) adalah inovasi teknologi di bidang layanan keuangan yang mencakup pembayaran digital, pinjaman *online*, dan pengelolaan investasi. *Fintech* memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh modal, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan transparansi dalam transaksi keuangan. Pemanfaatan *fintech* oleh UMKM mampu memperbaiki efisiensi operasional dan kinerja usaha dengan cara mengurangi kendala dalam akses pembiayaan.

Menurut Bank Indonesia (2022) *Financial Technology* atau yang lebih dikenal sebagai *fintech* adalah hasil dari perkembangan teknologi yang merevolusi cara individu dan bisnis mengelola keuangan. *Fintech* mengacu pada solusi teknologi inovatif yang dirancang untuk meningkatkan dan mengotomatisasi layanan keuangan. Dengan memanfaatkan *kecerdasan buatan (AI)*, *analitik data besar (big data)*, *blockchain*, dan teknologi digital lainnya, *fintech* memberikan akses yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien ke layanan keuangan .

Berdasarkan beberapa penjelasan tadi bisa ditarik simpulannya bahwa *Fintech* telah menjadi salah satu inovasi penting dalam era digital yang mendorong inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan transparansi. Namun, tantangan seperti keamanan data, regulasi, dan literasi keuangan masih perlu diatasi. Dukungan dari pemerintah, regulator, dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan *fintech* dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

2.2.3.2 Manfaat *Financial Technology*

Penggunaan *fintech* memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022) berikut adalah beberapa manfaat utama dari *fintech*:

1. *Fintech* berperan dalam memperluas inklusi keuangan dengan merangkul masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional (*unbanked*). Secara global, *fintech* telah memungkinkan lebih dari 1,2 miliar orang memperoleh akses terhadap layanan keuangan.
2. Teknologi *fintech* memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara *real-time*. Pembayaran digital dan transfer uang antarbank kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik, yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari.
3. Dengan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik, *fintech* mampu memangkas biaya operasional. Layanan P2P lending, misalnya, seringkali menyediakan bunga pinjaman yang lebih rendah ketimbang bank konvensional.
4. *Fintech* mendorong inovasi dalam produk keuangan, seperti tabungan mikro, asuransi berbasis digital, dan *robo-advisor* untuk investasi. Inovasi ini membuat layanan keuangan lebih personal dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Teknologi *blockchain* dan AI meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan. Dengan teknologi ini, risiko penipuan dapat diminimalisir dan transaksi dapat dilacak dengan lebih mudah.

3.2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Financial Technology

Menurut Arner, Barberis & Buckley (2022) terdapat berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi perkembangan Financial Technology:

1. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Perkembangan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data*, *Blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT) mendorong inovasi dalam layanan keuangan digital. Contoh: Penggunaan AI untuk *credit scoring* dan *chatbot* layanan pelanggan.

2. Inklusi Keuangan

Fintech memungkinkan masyarakat yang belum terlayani bank konvensional untuk memperoleh akses ke layanan keuangan. Contoh: Aplikasi dompet digital seperti OVO dan GoPay yang mempermudah transaksi mikro.

3. Regulasi Pemerintah dan Kebijakan Publik

Peraturan yang mendukung inovasi *Fintech* akan mempengaruhi perkembangan industri ini. Contoh: Kebijakan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pembayaran digital dan pinjaman online.

4. Perilaku dan Preferensi Konsumen

Meningkatnya preferensi masyarakat untuk transaksi digital mendorong penggunaan *Fintech*. Contoh: Masyarakat urban yang lebih memilih pembayaran nontunai.

5. Keamanan dan Privasi Data

Kepercayaan pengguna terhadap keamanan *platform Fintech* berpengaruh besar terhadap penggunaan teknologi ini. Contoh: Sertifikasi keamanan seperti ISO 27001 dan penggunaan *multi-factor authentication* (MFA).

6. Inovasi Model Bisnis

Pengembangan model bisnis yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Contoh: *Peer-to-peer* (P2P) lending dan layanan buy now pay later (BNPL).

7. Literasi Keuangan Digital

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital memengaruhi penggunaan *Fintech*. Contoh: Program edukasi digital banking dari lembaga keuangan.

3.2.3.3 Indikator *Financial Technology*

Menurut Arifuddin, et al. (2023) indikator *fintech* dapat diukur yaitu dengan dimensi sebagai berikut:

1. Pinjaman Modal

Layanan *fintech* yang menyediakan akses pinjaman modal usaha secara digital, umumnya melalui platform *Peer-to-Peer* (P2P) Lending yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dengan peminjam (UMKM/pelaku usaha) tanpa perantara bank.

2. Layanan Pembayaran Digital

Layanan *fintech* yang memungkinkan pelaku usaha melakukan dan menerima pembayaran secara elektronik atau digital, baik melalui QRIS, *e-wallet* (dompet digital), *virtual account*, maupun kartu kredit/debit.

3. Layanan Pengaturan Keuangan

Fitur atau aplikasi yang membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan usaha secara digital, termasuk pencatatan arus kas, penyusunan laporan keuangan, pengaturan anggaran, hingga manajemen utang dan piutang.

3.2.4 Literasi Keuangan

3.2.4.1 Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan merujuk pada pemahaman, kemampuan, dan kepercayaan diri seseorang dalam mengelola keuangan guna mengambil keputusan yang tepat (Lusardi & Mitchell, 2022). Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan usaha, literasi keuangan membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi risiko keuangan, mengelola kewajiban utang, serta membuat keputusan investasi yang optimal (Atkinson & Messy, 2022).

Literasi keuangan didefinisikan sebagai Keterampilan seseorang dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep keuangan, mulai dari pengelolaan dana, perencanaan, investasi, hingga pengambilan keputusan finansial yang bijaksana (Lusardi & Mitchell, 2022).

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), literasi keuangan mencakup pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan agar seseorang dapat mengelola sumber daya finansial secara efektif sepanjang hidupnya (OECD, 2022).

Jika merujuk pada pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Literasi keuangan merupakan kemampuan esensial yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan finansial di era modern. Dengan memahami dan menerapkan konsep keuangan yang baik, individu dapat meningkatkan kesejahteraan finansial,

menghindari kesulitan ekonomi, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Upaya peningkatan literasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi digital agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.2.4.2 Manfaat Literasi Keuangan

Menurut Atkinson & Messy (2022) literasi keuangan menawarkan berbagai keuntungan, di antaranya:

1. **Menghindari Kesulitan Keuangan**

Mereka yang memiliki literasi keuangan yang baik umumnya lebih mampu mengelola penghasilannya dan terhindar dari utang yang tidak mendatangkan manfaat produktif. Penelitian oleh Lusardi dan Mitchell (2022) membuktikan bahwa minimnya literasi keuangan berhubungan dengan tingginya kemungkinan seseorang terjatuh hutang berlebihan dan gagal membayar kewajiban finansialnya.

2. **Meningkatkan Perencanaan Masa Depan**

Literasi keuangan membantu individu merencanakan keuangan jangka panjang, seperti menabung untuk pendidikan, membeli rumah, atau mempersiapkan dana pensiun. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki perencanaan keuangan yang matang memiliki kesejahteraan finansial yang lebih baik di masa tua.

3. **Mengurangi Risiko Penipuan Keuangan**

Dengan pengetahuan yang memadai, seseorang dapat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan keuangan atau investasi bodong. Mereka juga lebih

cenderung melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi atau melakukan transaksi keuangan lainnya (Lusardi & Mitchell, 2022).

3.2.4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

1. Tingkat Literasi Keuangan yang Rendah

Menurut Data SNLIK yang dirilis OJK tahun 2022 mencatat bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di level 49,68%, meskipun mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari populasi masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep keuangan dasar.

2. Disparitas Antar Wilayah

Tingkat literasi keuangan umumnya lebih tinggi di kota dibandingkan di desa. Faktor seperti akses informasi, pendidikan, dan infrastruktur menjadi penyebab utama dari ketimpangan ini (Sudarsono et al., 2022). Program literasi keuangan yang menjangkau daerah terpencil menjadi sangat penting untuk mengatasi disparitas ini.

3. Pengaruh Budaya dan Sosial

Budaya konsumtif dan gaya hidup hedonis yang berkembang di kalangan generasi muda menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan literasi keuangan. Pendidikan sejak dini tentang pentingnya menabung dan mengelola keuangan secara bijak perlu diperkuat di lingkungan keluarga dan sekolah (Permatasari, 2021).

3.2.4.4 Indikator Literasi Keuangan

Menurut Melisa, Salihi & Meifari (2023) literasi keuangan memiliki berbagai dimensi yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pengetahuan Umum Keuangan

Yakni memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemahaman dasar tentang keuangan.

2. Tabungan Dan Pinjaman

Merujuk pada dana yang ditabung dari sisa pendapatan yang tidak dipakai untuk belanja, sedangkan pinjaman adalah pendanaan yang diperoleh dari pihak lain, misalnya teman atau lembaga keuangan seperti bank.

3. Asuransi

Kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung berjanji menanggung kerugian yang tidak dapat diprediksi, dengan syarat tertanggung membayar premi.

4. Investasi

Yakni menunda pengeluaran saat ini agar dapat dialokasikan ke aset produktif dalam jangka waktu tertentu.

3.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel yang berisi hasil penelitian terdahulu terkait pengelolaan keuangan, penggunaan *fintech*, dan literasi keuangan terhadap kinerja usaha yaitu:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mulyati & Nurhayati (2022)	Penerapan Literasi Keuangan Dan Penggunaan Financial Technology Untuk Menilai Kinerja Usaha UMKM Di Jawa Barat	Independen: Literasi Keuangan (X1), <i>Fintech</i> (X2), Lingkungan Sosial (X3) Dependen: Kinerja Usaha (Y)	1. Tingkat literasi keuangan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan usaha. 2. Penggunaan financial technology secara signifikan memengaruhi kinerja bisnis.
2	Dewi & Candraningrat (2024)	Hubungan Literasi Keuangan dan Kinerja Keuangan dengan Keberlanjutan Bisnis: Kinerja Usaha UMKM di Kota Denpasar	Independen: Literasi Keuangan (X1), Kinerja Keuangan (X2) Dependen: Kinerja usaha UMKM (Y)	1. Pemahaman literasi keuangan memberikan dampak positif dan signifikan pada kinerja UMKM. 2. Literasi keuangan terbukti berkontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha UMKM
3	Yulianto & Rita (2023)	Mediasi Perilaku Pengelolaan Keuangan Dalam Pengaruh <i>Fintech</i> Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha	Independen: <i>Fintech</i> (X1), Literasi Keuangan (X2), Pengelolaan Mediasi: Pengelolaan Keuangan (Z) Dependen: Kinerja Usaha (Y)	1. Pemanfaatan <i>fintech</i> berdampak positif dan signifikan pada pengelolaan keuangan yang mendukung kinerja usaha UMKM. 2. Tingkat literasi keuangan secara positif dan signifikan memengaruhi pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan

				kinerja usaha UMKM
4	Sholeha & Kharisma (2024)	Pengaruh Financial Technology (<i>Fintech</i>) Terhadap Kinerja UMKM Melalui Mediasi Akses Keuangan Di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia	Independen: Financial Technology (X) Mediasi: Akses Keuangan (Z) Dependen: Kinerja Usaha UMKM (Y2)	1. inancial technology terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan dalam memperluas akses keuangan. 2. Financial technology menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap performa usaha UMKM. 3. Akses keuangan memediasi hubungan antara financial technology dan kinerja usaha UMKM dengan pengaruh yang positif dan signifikan
5	Armilia & Isbanah (2023)	Literasi Keuangan, Perilaku Pengelolaan Keuangan Dan <i>Fintech</i> Terhadap Kinerja Usaha	Independen: <i>Fintech</i> (X) Mediasi: Pengelolaan Keuangan (Z) Dependen: Kinerja Usaha (Y)	1. Pemanfaatan <i>fintech</i> dapat mengubah perilaku pengelolaan keuangan dan membawa dampak pada kinerja usaha
6	Ramadhan & Asandimitra (2023)	Pengaruh Literasi Keuangan dan <i>Fintech</i> terhadap Kinerja Usaha UMKM Studi Kasus pada UMKM di Kota Bandung	Independen: Literasi Keuangan (X1) Penggunaan <i>Fintech</i> (X2) Dependen: Kinerja Usaha UMKM (Y)	1. Literasi keuangan memiliki dampak positif terhadap kinerja usaha UMKM. 2. Pemanfaatan <i>fintech</i> memberikan pengaruh positif

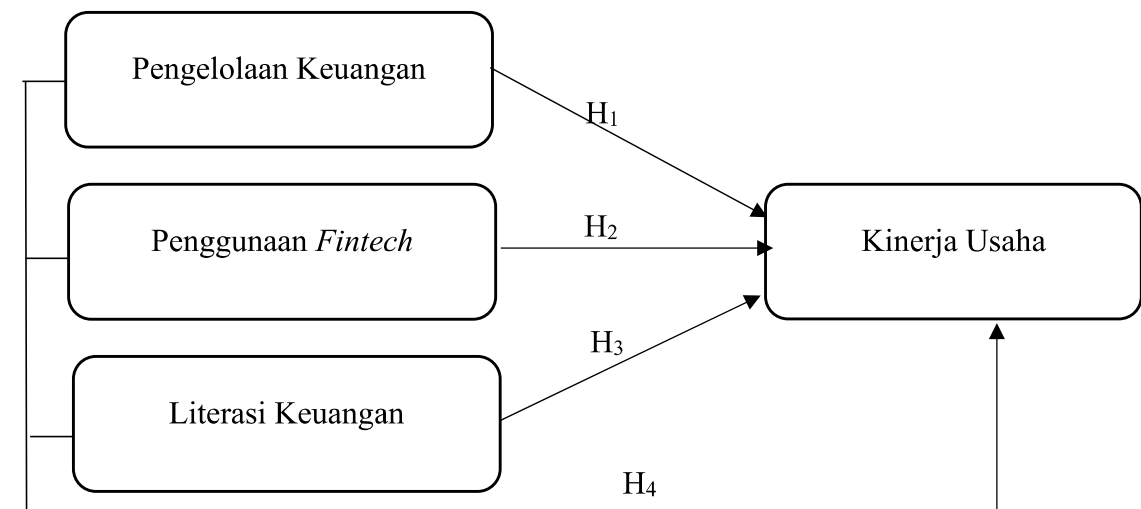
				terhadap kinerja usaha UMKM
7	Arifuddin et al. (2023)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha	Independen: Pengelolaan Keuangan (X1) Literasi Keuangan (X2) Dependen: Kinerja Usaha (Y)	1. Pengelolaan Keuangan berkontribusi positif dan signifikan dalam memengaruhi kinerja usaha. 2. Literasi keuangan terbukti berpengaruh positif serta signifikan terhadap performa usaha
8	Sadalia et al. (2022)	<i>Fintech</i> dan Perilaku Keuangan Terhadap Kinerja Usaha UMKM	Independen: <i>Fintech</i> (X1) Perilaku Keuangan (X2) Dependen: Kinerja Usaha UMKM	1. Financial technology terbukti berpengaruh signifikan terhadap performa usaha UMKM. 2. Perilaku dalam mengelola keuangan secara signifikan memengaruhi kinerja usaha UMKM
9	Ramadhani dan Ovami (2021)	Pengaruh <i>Fintech</i> dan Perilaku Keuangan Generasi Milenial Terhadap Kinerja Usaha	Independen: <i>Fintech</i> (X1) Perilaku Keuangan (X2) Dependen: Kinerja Usaha UMKM (Y)	1. <i>Fintech</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja usaha UMKM. 2. Perilaku keuangan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja usaha UMKM
10	Suardana (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan dan Minat	Independen: Literasi Keuangan (X1)	1. Tingkat literasi keuangan berkontribusi positif dan signifikan terhadap performa UMKM

		Menggunakan E-Commerce Terhadap Kinerja Usaha UMKM di Kecamatan Buleleng	Akses Permodalan (X2) Minat Menggunakan E-Commerce (X3) Dependen: Kinerja Usaha UMKM (Y)	di Kecamatan Buleleng. 2. Kemudahan akses modal menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng. 3. Ketertarikan menggunakan e-commerce berdampak positif dan signifikan pada kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng
11	Septiani (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha UMKM di Sidoarjo	Independen: Literasi Keuangan (X1) Inklusi Keuangan (X2) Dependen: Kinerja UMKM (Y)	1. Tingkat literasi keuangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap performa usaha UMKM. 2. Akses inklusi keuangan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha UMKM

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu, 2024

2.4 Kerangka Pemikiran

Riset ini mengkaji pengaruh pengelolaan keuangan, penerapan *fintech*, dan tingkat literasi keuangan terhadap kinerja usaha. Berikut uraian gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu:



Sumber : Peneliti 2024

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Usaha UMKM di Kecamatan Batu Aji Batam

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara pemilik usaha (prinsipal) dan pengelola usaha (agen). Pemilik usaha UMKM seringkali bertindak sebagai pengelola langsung. Namun, dalam situasi di mana pemilik mendelegasikan pengelolaan keuangan kepada pihak lain (misalnya, akuntan atau manajer), terjadi potensi konflik kepentingan atau masalah keagenan (*agency problem*).

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat meminimalisir konflik keagenan dan meningkatkan efisiensi operasional, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja usaha. Dengan penerapan mekanisme pengawasan keuangan yang baik, pemilik usaha dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan usaha. Menurut Brigham dan Houston (2021), pengelolaan keuangan yang efektif adalah kunci keberhasilan

dalam pencapaian tujuan usaha karena membantu perusahaan memaksimalkan nilai dan mengelola risiko secara optimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin et al. (2023) dan Yulianto & Rita (2023) diketahui bahwa pengelolaan keuangan yang efisien memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan peningkatan kinerja usaha, baik dari segi profitabilitas maupun pertumbuhan.

Karenanya, dari penjelasan di atas, hipotesis pertama dapat ditetapkan sebagai berikut:

H₁: Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Usaha

2.5.2 Pengaruh Penggunaan *Fintech* Terhadap Kinerja Usaha UMKM di

Kecamatan Batu Aji Batam

Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*) dalam konteks penggunaan *fintech* di UMKM, *fintech* sebagai bentuk inovasi digital diserap oleh pelaku usaha. *Fintech* menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif, seperti sistem pembayaran digital, pinjaman online, serta aplikasi pencatatan keuangan, namun tidak semua UMKM secara seragam teknologi dalam kegiatan usahanya, hal ini dikarenakan beberapa faktor-faktor seperti tingkat literasi digital, usia pemilik usaha, akses terhadap internet, dan kepercayaan terhadap sistem digital sangat memengaruhi proses adopsi tersebut. Hal ini akan mengurangi potensi masalah agensi dan meningkatkan kepercayaan antara pemilik usaha dan pemberi modal, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kinerja usaha UMKM.

Penggunaan teknologi finansial (*fintech*) oleh pelaku UMKM dapat meningkatkan kinerja usaha dengan memperbaiki akses terhadap layanan keuangan, efisiensi pengelolaan keuangan, serta kemampuan untuk mengakses modal secara lebih cepat dan mudah. Dalam konteks UMKM di Kecamatan Batu Aji, Batam, penerapan layanan *fintech* seperti pembayaran digital, platform pinjaman *peer-to-peer* (P2P *lending*), dan aplikasi akuntansi digital diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan akses permodalan dan meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Armilia & Isbanah (2023) dan Sholeha & Kharisma (2024) diketahui bahwa penggunaan *Fintech* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha UMKM.

Karenanya, dari penjelasan di atas, hipotesis pertama dapat ditetapkan sebagai berikut:

H₂: Penggunaan *Fintech* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Usaha

2.5.3 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha UMKM di Kecamatan Batu Aji Batam

Theory of Reasoned Action (TRA) pada konteks UMKM, TRA sering digunakan untuk menjelaskan bahwa niat pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi digital, seperti aplikasi keuangan, e-commerce, atau media sosial sebagai alat pemasaran dan keputusan pelaku UMKM dalam menjalankan praktik usaha tertentu, misalnya dalam pengelolaan keuangan, inovasi produk, atau partisipasi dalam pelatihan. Sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu jika seorang pelaku UMKM memiliki sikap positif terhadap penggunaan aplikasi pencatatan keuangan

(misalnya menganggapnya membantu dan efisien), serta merasa bahwa lingkungan sosialnya (rekan bisnis, konsultan, keluarga) mendukung penggunaan aplikasi tersebut, maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan berniat untuk menggunakannya dan kemudian benar-benar menggunakannya dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Tingkat literasi keuangan yang tinggi memungkinkan pemilik usaha untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan mengoptimalkan sumber daya keuangan sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2020) dan Suardana (2020), diketahui bahwa literasi keuangan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan usaha kecil dan menengah (UMKM). Pemilik usaha dengan literasi keuangan tinggi lebih mampu mengelola keuangan mereka dengan baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki literasi keuangan rendah.

Karenanya, dari poin di atas, hipotesis pertama dapat ditetapkan sebagai berikut:

H₃: Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Usaha

2.5.4 Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Financial Technology dan Literasi

Keuangan Terhadap Kinerja Usaha UMKM di Kecamatan Batu Aji Batam

Dalam perspektif teori agensi Pengelolaan keuangan yang baik, pemanfaatan *fintech*, dan peningkatan literasi keuangan dapat membantu meminimalkan masalah agensi seperti penyalahgunaan dana atau pengambilan keputusan yang tidak optimal. Dengan meningkatkan literasi dan menggunakan teknologi keuangan, pemilik usaha lebih mampu mengawasi pengelolaan keuangan, memperjelas

transparansi transaksi, serta memitigasi risiko kerugian akibat informasi asimetris. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelolaan keuangan yang efektif, pemanfaatan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*), dan tingkat literasi keuangan merupakan faktor-faktor penting yang memengaruhi kinerja usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan, *fintech* dan literasi keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja usaha UMKm.

Karenanya, dari penjelasan di atas, hipotesis pertama dapat ditetapkan sebagai berikut:

H₄: Pengelolaan Keuangan, Financial Technology dan Literasi Keuangan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja Usaha